

IRAK KEKUATAN BARU DI TIMUR TENGAH

Kirdi DIPOYUDO

Setahun setelah Saddam Hussein berkuasa sebagai Presiden Irak, kiranya bermanfaat untuk membuat suatu neraca sementara dari hasil-hasil maupun kegagalan-kegagalan negarawan yang pragmatis, ambisius, agresif dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan ini yang memimpin suatu negara yang memiliki potensi ekonomi, militer dan tenaga ahli serta kedudukan strategis seperti Irak. Sewaktu masih menjabat sebagai Wakil Presiden, dia telah dijuluki "orang kuat" Irak, tetapi selama tahun 1979 dia memperoleh kedudukan terkemuka di Dunia Arab dan berhasil memperkuat kedudukan internasionalnya sebagai seorang negarawan kunci di Dunia Arab dan Nonblok.

Premis dasar kita dalam membahas kedudukan Irak setahun setelah Saddam Hussein berkuasa ialah bahwa terdapat kaitan jelas antara kejadian-kejadian dalam negeri dan politik luar negeri Irak. Walaupun premis ini berlaku bagi banyak negara, kalau tidak semua negara, dalam hal Irak ini sangat menyolok. Yang dimaksud bukan saja kenyataan bahwa sumber-sumber daya Irak memungkinkannya mengembangkan politik luar negeri yang ambisius dan dinamis, tetapi juga kenyataan bahwa dia harus menghadapi serangkaian masalah politik dan keamanan yang segi-segi intern dan eksternnya berkaitan satu sama lain. Misalnya keresahan umat Shia di Irak Selatan dikobarkan oleh Revolusi Khomeini di Iran, sedangkan hubungan Irak—Iran dipengaruhi oleh politik rezim Irak terhadap umat Shia. Misal lain ialah mendinginnya hubungan antara Irak dan Uni Soviet (dengan latar belakang aspirasi-aspirasi regional Uni Soviet dari Tanduk Afrika sampai Afghanistan) yang tercermin dalam politik Irak terhadap Partai Komunis Irak dan kesediaan golongan komunis untuk ke luar dari kerja samanya dengan Partai Baath. Sikap anti komunis Irak, tidak peduli apakah sikap itu akibat atau salah satu sebab politiknya terhadap Uni Soviet, meningkatkan kemampuannya untuk mengadakan manuver politik di kawasan Teluk dan membantunya dalam usahanya untuk mendapatkan suatu kedudukan terkemuka.

IRAK



Diambil dari *The Middle East Annual Review 1980* (Saffron Walden, 1980), hal. 223

1. KEADAAN DALAM NEGERI

Perkembangan-perkembangan dalam negeri Irak mempunyai bermacam-macam ciri yang tidak selalu baru. Di bawah ini kita akan berusaha menguraikan ciri-ciri yang paling menonjol dalam periode Saddam Hussein menjabat sebagai presiden.

Kegiatan Oposisi

Kegiatan oposisi berbagai unsur berulang kali meningkat, lebih sering daripada di masa lampau. Unsur-unsur itu dapat dibagi dalam dua kategori: pusat-pusat oposisi tradisional di luar pemerintahan - umat Shia, suku Kurdi dan kaum komunis - dan unsur-unsur oposisi atau semi oposisi dalam kelompok yang berkuasa - unsur-unsur dalam angkatan bersenjata yang menantang kepemimpinan presiden yang untuk pertama kalinya selama 22 tahun tidak berasal dari tentara, dan unsur-unsur dalam Partai Baath dan dalam sektor sipil di mana tampak tanda-tanda pembangkangan.

Selama tahun 1979 pergolakan di antara golongan Shia yang merupakan 50-60% penduduk Irak sebanyak 13 juta rupanya meningkat. Faktor-faktor permanen oposisi Shia Irak diperkuat oleh suatu faktor lain yang membakar, yaitu Revolusi Khomeini di Iran yang memberikan segala bantuan yang mungkin kepada kelompok-kelompok bawah tanah di antara umat Shia Irak. Ini adalah akibat cara-cara represif rezim dan kurangnya koordinasi di antara kelompok-kelompok Shia. Partai Daawa yang didukung Iran adalah yang paling menonjol. Pemerintah Baath mengambil tindakan-tindakan tegas: melarang Partai Daawa, secara fisik melenyapkan pemimpin-pemimpinnya termasuk Imam Mohamed Bakr Sadr, mengusir 30.000 orang Shia keturunan Iran dan lain sebagainya. Pada waktu yang sama, rezim Irak seperti semua tiran, memberikan isyarat-isyarat konsiliatoris, berjanji akan memperbaiki taraf hidup golongan Shia, dan berusaha mengambil hati kepala-kepala suku Shia dengan membagi-bagikan hadiah dan lain-lain bujukan. Pada hemat kami, ancaman Shia yang membayangi setiap rezim Sunni di Bagdad, kiranya tidak akan menjadi sangat besar di masa mendatang ini, paling tidak selama konfrontasi Irak—Iran tidak melampaui bentuknya yang terbatas dan dikendalikan sekarang ini. Dalam suatu konfrontasi total Bagdad akan menganggap ancaman Shia lebih berat.

Menyusul beberapa tahun ketenangan di Kurdistan Irak, kegiatan Kurdi muncul kembali, biarpun terbatas, akibat dorongan Iran di bawah Khomeini. Secara formal, orang-orang Kurdi yang merupakan 18% penduduk masih

merupakan anggota dalam Front Nasional Progresif, suatu aliansi di mana Partai Baath mempunyai suara mayoritas yang sangat besar. Implementasi otonomi Kurdi berjalan terus dan pemilihan dewan otonomi Kurdi diharapkan. Akan tetapi dua faksi, yaitu faksi Barazani (Partai Demokrasi Kurdi) dan faksi Tabalani (Persatuan Nasional) aktif di daerah perbatasan Irak—Iran. Keduanya beroperasi dari wilayah Iran dan faksi Tabalani menerima bantuan dari Suriah. Kegiatan Kurdi di luar negeri, khususnya di Eropa Barat, berlangsung terus seperti biasanya, dengan suatu inovasi, yaitu kerja sama dengan orang-orang komunis Irak dalam pengasingan. Adanya bantuan Soviet tidak begitu jelas, tetapi ada petunjuk-petunjuk bahwa Uni Soviet memberikan dukungan. Selama enam bulan pertama rezim Saddam Hussein, orang-orang komunis melarikan diri ke Utara dan sementara di antara mereka bergabung dengan pejuang-pejuang Kurdi.

Rezim Saddam Hussein berusaha memajukan isu otonomi dengan cara-cara luar biasa seperti menghimbau orang-orang Kurdi dalam pengasingan agar kembali ke Irak, di mana mereka akan mendapat pengampunan dan direhabilitasi; memberikan ampun kepada orang-orang Kurdi di penjara-penjara Irak dan lain sebagainya. Sebaliknya orang-orang Kurdi tetap menuntut implementasi otonomi kebudayaan maupun politik; pemukiman kembali orang-orang Kurdi yang dibuang ke luar negeri atau dikirimkan ke Selatan di Kurdistan; bagian pendapatan minyak wilayah Kurdi (Mosul) dan seterusnya.

Pendek kata, masalah Kurdi tetap merupakan suatu faktor ketidakstabilan rezim Irak, dan sepertiga tentara Irak ditempatkan di Kurdistan atau di dekatnya untuk menghadapi setiap perkembangan negatif.

Hubungan golongan komunis dengan rezim Baath di Bagdad adalah suatu krisis permanen yang manifestasi-manifestasinya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Menyusul tindakan-tindakan penindasan yang keras (digantungnya 21 orang aktivis) pada musim semi tahun 1978 dan meningkatnya pengawasan atas kegiatan pemimpin-pemimpin partai, mereka ini menyadari kedudukan mereka yang lebih lemah dalam pertarungan dan memutuskan ke luar dari kerja sama resmi dengan Partai Baath (termasuk ke luar dari pemerintah koalisi) dan bergerak di bawah tanah (Mei 1979). Kegiatan resmi partai dibekukan sama sekali. Pemimpin-pemimpin dan para aktivis ditampung di ibukota-ibukota Eropa Timur dan Yaman Selatan dengan bantuan Soviet. Karena partai bergerak di bawah tanah, maka sulit bagi pemerintah untuk mengawasinya dan rupanya hal itu mendorong rezim untuk mengajak para aktivis partai membuka kembali dialog dan muncul dari bawah tanah. Sejauh ini kaum komunis, rupanya dalam koordinasi dengan Moskwa, menolak untuk kembali ke Front Nasional Progresif. Penolakan mereka untuk ikut dalam pemilihan Majelis Nasional belum lama berselang menunjukkan bahwa

mereka bermaksud meneruskan perjuangan rahasia mereka setelah muncul unsur-unsur tambahan di front dalam negeri.

Mengenai unsur-unsur oposisi dalam kelompok yang berkuasa itu sendiri, di bawah ini diuraikan ciri-cirinya atas dasar informasi parsial yang bobotnya berbeda-beda.

Sepanjang tahun dalam pembahasan ini ada laporan-laporan mengenai adanya ketidakpuasan di kalangan para perwira profesional. Perwira-perwira senior, atau sementara di antara mereka, sudah kurang puas dengan Saddam Hussein ketika dia Wakil Presiden Bakr, tetapi pada waktu itu rasa hormat mereka untuk presiden melunakkan sikap mereka. Pengunduran diri, atau penyingkirannya, pada bulan Juli 1979 rupanya membangkitkan kembali permusuhan yang laten terhadap presiden yang baru. Selain itu, tampilnya Saddam Hussein sebagai Kepala Negara dibarengi pembersihan pada eselon-eselon atas angkatan darat, termasuk eksekusi Panglima yang terkenal Jenderal Walid Mohamed Sirat, yang dituduh terlibat dalam "komplotan Suriah". Lain-lain perwira dimasukkan penjara. Pada bulan-bulan pertama pemerintahannya, presiden baru itu memindahkan hampir 2.000 perwira dan bintara, rupanya sebagai tindakan pengamanan. Dia juga memerintahkan agar setiap orang yang dicurigai tidak loyal terhadap Partai Baath dipensiun, dan lebih banyak lagi ditempatkan di bawah pengawasan yang terus menerus. Dengan demikian tidaklah mengherankan bahwa perwira-perwira Irak meninggalkan Irak (misalnya ke Iran pada bulan September 1979). Alasan lain ketidakpuasan korps perwira ialah penunjukan ipar Saddam Hussein, Adnan Khairallah, sebagai Menteri Pertahanan, biarpun dia termasuk muda dan kurang pengalaman.

Biarpun tidak cukup informasi mengenai hal itu, adalah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa pembersihan itu memperkuat kekuasaan presiden atas angkatan darat, tetapi tidak diragukan bahwa hal itu juga menimbulkan lebih banyak ketidakpuasan yang telah memancing dan akan memancing usaha-usaha untuk menantang kekuasaan Saddam Hussein atas angkatan darat dan kedudukannya sebagai presiden. Laporan mengenai eksekusi perwira-perwira pada akhir 1979 dan bulan-bulan pertama 1980 mungkin merupakan buktinya. Rezim rupanya sadar akan adanya ketidakpuasan dalam Angkatan Darat itu dan mungkin itulah yang telah mendorongnya untuk memberikan tunjangan-tunjangan kepada perwira-perwira dan bintara-bintara tahun 1979.

Ada alasan untuk berpendapat bahwa kepemimpinan politik yang tampaknya kohesif tidak mengungkapkan keadaan dalam negeri. Dalam tahun pertamanya sebagai presiden, Saddam Hussein mengambil serangkaian langkah yang menunjukkan adanya persaingan dan bahkan mungkin perebutan kekua-

saan dalam tubuh pimpinan. Misalnya pengangkatan Izzat Ibrahim Al-Douri, pemuji presiden dan seorang tanpa warna, sebagai wakil presiden untuk memblokir orang-orang yang berkuasa seperti Taha Yassin Ramadhan, Wakil Perdana Menteri I, dan Saadam Ghaidan, seorang bekas jenderal dan sekarang Menteri Perhubungan. Ramadhan kini dilukiskan sebagai orang kuat Irak sesudah Saddam Hussein. Dia mempunyai basis kekuasaan dan pengaruhnya sendiri dan kedudukannya dalam partai adalah kuat. Kalau benar laporan-laporan dan penilaian bahwa Saddam Hussein, ketika terbongkar suatu rencana kudeta terhadapnya tahun 1979, juga ingin menyingkirkan Ramadhan tetapi tidak berani melakukannya, maka hal itu bisa membawa ke perkembangan-perkembangan lebih lanjut. Bagaimanapun, bahkan di puncak piramide presiden tidak mempunyai pilihan kecuali mengandalkan lingkungan kecil orang-orang yang loyal padanya, yang umumnya berasal dari kota kelahirannya Takrit, seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Intelijen, yang tak lain ialah saudara tirinya Barazan Takriti.

Penangkapan beberapa orang partai tak lama setelah Saddam Hussein menjadi presiden mungkin merupakan suatu petunjuk besarnya ketidakstabilan dalam tubuh partai selama 1979. Di antara mereka yang ditangkap itu adalah Dr. Munif Al-Razaz, seorang Sunni keturunan Jordania yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komando Nasional. Bahwa Michel Aflaq, pendiri Partai Baath, meninggalkan Bagdad menyusul penangkapan rekan-rekannya rupanya adalah untuk memprotesnya. Ada orang yang menafsirkan langkah-langkah itu sebagai reaksi Saddam Hussein terhadap kecaman yang dilontarkan oleh rekan-rekan separtainya terhadap politik pintu terbukanya untuk Barat.

Pada musim dingin tahun 1979/1980 diketahui bahwa pejabat-pejabat tinggi pemerintah dipenjarakan dan dijatuhi hukuman mati. Latar belakangnya tidak diketahui, tetapi mungkin mempunyai segi ideologi. Bagaimanapun, tidak diragukan bahwa kejadian-kejadian itu juga merupakan faktor ketidakstabilan dalam pemerintahan itu sendiri.

Selama tahun 1979 juga ada laporan-laporan mengenai penangkapan aktivis-aktivis menyusul kegiatan-kegiatan seperti penyebaran selebaran atas nama "kaum independen dari Partai Baath".

Sebagai ringkasan, Partai Baath Irak bukan suatu organisasi homogen yang secara otomatis memihak presiden, tetapi suatu lembaga yang sampai batas-batas tertentu pecah selama bertahun-tahun dalam berbagai aliran, kelompok dan oknum yang saling bersaing, yang memaksa Saddam Hussein mengawasi dengan ketat apa yang terjadi di dalamnya.

Gaya Operasi Rezim

Khususnya dapat dicatat sentralisasi dan sifat kekerasan rezim presiden-sial, yang menganut politik suatu negara polisi. Walaupun media massa memuat sedikit informasi mengenai hal ini, tahun pertama Saddam Hussein sebagai presiden rupanya tahun pengekangan politik di Irak. Tahun itu adalah tahun keresahan di mana tangan besi presiden lebih brutal dari waktu sebelumnya dan sudah mulai terasa pada hari-hari pertama Presiden Saddam Hussein ketika pejabat-pejabat partai dan pemerintah dijatuhi hukuman mati. Kekerasan brutal adalah bagian politik Saddam Hussein. Dibandingkan dengan pendahulunya Presiden Bakr, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Saddam Hussein tidak mempunyai akibat pemantapan kehidupan politik karena kepribadian, gaya operasi, motif-motif, impuls-impuls dan ambisi-ambisinya. Kenyataannya ada kesan bahwa dia gagal memperluas basis kekuasaannya.

Usaha Memperbaiki Citra Saddam Hussein

Selama enam bulan kedua kepresidenannya, setelah berhasil memperkuat kedudukannya dan mengatasi ancaman-ancaman terhadapnya, Saddam Hussein memalingkan perhatiannya untuk mengadakan kontak langsung dengan rakyat, untuk memperkuat kepercayaan umum akan rezimnya dan memperbaiki citranya yang bernoda. Maka di samping menunjukkan suatu tangan besi, dia mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib orang-orang dan masyarakat sebagai keseluruhan dengan meningkatkan gaji pegawai negeri sipil dan militer, memperbaiki keadaan pangan di kota-kota, menggalakkan perdagangan swasta, menindas kaum birokrat yang membuat rakyat menderita, secara pribadi mendengarkan keluhan-keluhan orang-orang, dan menunjukkan toleransi dan secara positif menyebutkan Islam dan tradisi, dan seterusnya. Media massa Irak secara luas memberitakan kegiatan Saddam Hussein dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam proyek-proyek ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, seperti pemberantasan buta huruf, membuka peluang-peluang ekonomi, sosial dan politik bagi kaum wanita Irak, mengadakan pemilihan parlemen (Majelis Nasional) yang tidak diadakan selama satu generasi, dan lain sebagainya.

Sementara pengamat melihat persamaan antara kultus pribadi yang berkembang di Irak dan kultus pribadi yang terdapat di Uni Soviet pada masa Stalin, dan cukup banyak orang mencontoh cara-cara Saddam Hussein seperti cara-cara Stalin. Bahkan dapat dikatakan bahwa di Irak negara didahulukan di atas perorangan. Akan tetapi bahkan kalau langkah-langkah rezim untuk

rakyat jelas mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki nama baik dan citranya, kita tidak boleh memperkecil arti sumbangan yang diberikan langkah-langkah itu untuk memajukan masyarakat Irak.

Buildup Militer

Di bawah Saddam Hussein buildup militer berlangsung terus, antara lain sebagai sarana untuk mencapai sasaran-sasaran politik di kawasan, di Dunia Arab dan di Dunia Ketiga. Unsur-unsur yang menonjol dari buildup militer itu ialah berlanjutnya pembelian perlengkapan militer secara besar-besaran di Timur dan Barat, dan pembentukan kerangka-kerangka yang disertai usaha-usaha untuk mengatasi masalah tenaga ahli dan memperbaiki kemampuan tentara untuk beroperasi dekat maupun jauh dari Irak (tentara ekspedisi ke "Front Timur" melawan Israel, peningkatan Angkatan Laut).

Biarpun hubungan dengan Moskwa menjadi dingin, Uni Soviet tetap merupakan pemasok utama tentara Irak. Arus senjata Soviet terus mengalir selama tahun 1979 dan meliputi sistem-sistem senjata yang telah dimiliki Irak maupun yang baru - tank T-72, meriam mobil 122 mm dan 152 mm. Pada akhir 1978 sejumlah helikopter tempur Mig-24 dan pesawat angkut Il-76 tiba di Irak.

Pada waktu yang sama pintu ke Barat dibuka lebih lebar sebagai bagian kebijaksanaan diversifikasi sumber-sumber senjata Irak. Kebijakan ini diambil sesudah perang 1973 dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan Irak pada suplai dari Uni Soviet, mendapatkan senjata yang ditolak oleh Uni Soviet, dan meningkatkan persenjataan tentara Irak dengan teknologi Barat yang maju. Khususnya dapat dicatat kontrak-kontrak senjata dengan Perancis (pesawat Mirage F-1 termasuk persenjataan yang rumit, panzer Panhard M3 dengan misil Hot), Brasilia (panzer Cascavel dan Urutu), Jerman Barat (pengangkut tank) dan Italia (kapal-kapal). Kontrak-kontrak itu juga meliputi latihan kader-kader di negara-negara itu.

Di samping perbaikan kerangka-kerangka itu, pada tahun 1979 dilakukan usaha untuk menggunakan senjata-senjata baru dari Timur maupun Barat untuk mengisi kekurangan-kekurangan dalam kerangka-kerangka yang ada dan membentuk kerangka-kerangka baru. Pembentukan divisi panzer keempat (no. 9) telah selesai. Juga mungkin telah dibentuk kerangka-kerangka untuk dua brigade panzer baru (belum jelas apakah yang dimaksud ini adalah penyelesaian Divisi 9, pembentukan brigade panzer yang independen, atau basis bagi pembentukan divisi yang kelima). Irak juga telah menyelesaikan

persiapan-persiapan organisasi untuk suatu divisi infanteri baru (divisi pengawal tapal batas, divisi infantri, atau divisi pegunungan). Seluruhnya kini terdapat 12-13 kerangka divisi lawan 6-7 menjelang tahun 1973.

Yang menyolok dari buildup tahun 1979 ialah tambahan 100 pesawat pemburu (sehingga seluruhnya berjumlah 550), tambahan 500 tank (menjadi 3.000), diperkuatnya satuan-satuan anti tank yang mobil (udara dan darat), dan peningkatan mobilitas angkatan darat. Transaksi Mirage F-1 belum termasuk karena implementasinya baru saja mulai.

Pembentukan suatu satuan SAM tingkat brigade pada H-3 telah selesai. Satuan ini meliputi 7 batterij SA-2/3 dan satu brigade SA-6 yang mobil. Di lapangan terbang H-3 ditempatkan satu skuadron Mig-23 dan 8 Mig-21. Bahwa Irak memandang daerah H-3 penting bukan hal baru dan kenyataannya rezim Saddam Hussein hanya meneruskan implementasi suatu rencana lama untuk menjadikan daerah H-3 suatu batu loncatan bagi pasukan-pasukan yang dimaksud untuk Front Timur. Kegiatan di daerah ini juga sesuai dengan rayuan Irak terhadap Jordania di bidang militer (koordinasi pengawasan udara, kunjungan-kunjungan dan seterusnya).

Buildup militer itu juga meliputi Tentara Rakyat yang sering disebut Tentara Partai yang tugas pokoknya ialah melindungi rezim. Tentara Rakyat ini meliputi dinas pra-militer dan berjumlah sekitar 150.000 orang. Menurut laporan, tentara ini juga menerima senjata-senjata sedang.

Pengembangan kemampuan nuklir Irak berlangsung sejak Bagdad menandatangani suatu transaksi minyak-untuk-atom dengan Perancis pada tahun 1975. Perkembangan yang paling baru ialah suplai uranium yang diperkaya oleh Perancis untuk Irak.

Pembangunan Ekonomi

Salah satu kebijaksanaan Saddam Hussein selama tahun 1979 ialah memperkuat perekonomian Irak. Kebijakan ekonomi dalam negeri Irak bercirikan usaha untuk memperbaiki taraf hidup kelas-kelas rendah, termasuk golongan Shia.

Produksi minyaknya meningkat. Pada tahun 1979 produksi rata-rata ialah 3,7 juta barrel per hari. Dengan demikian Irak adalah penghasil minyak yang kedua sesudah Arab Saudi. Dapat dicatat bahwa Irak menganut suatu politik minyak yang masuk akal; dia tidak lagi termasuk kelompok keras dalam

OPEC mengenai harga dan dia berkeberatan terhadap penggunaan minyak sebagai senjata tanpa dukungan konsensus Arab.

Pendapatan minyak tahun 1979 sebesar US\$ 20 milyar digunakan untuk mengembangkan industri minyak - pabrik-pabrik kilang, pabrik-pabrik petrokimia dan pupuk. Banyak diantaranya menggunakan gas alam, hasil sampingan minyak. Proyek-proyek ini dan proyek-proyek lain dibangun dengan kerja sama perusahaan-perusahaan Barat yang meningkat, terutama perusahaan-perusahaan Jepang, Perancis dan Italia. Ini juga berlaku bagi lain-lain proyek industri.

Perdagangan dengan Barat berkembang lebih cepat daripada perdagangan dengan Uni Soviet dan Eropa Timur. Irak juga menandatangani banyak kontrak dengan negara-negara Dunia Ketiga. Persetujuan-persetujuan ini meliputi pinjaman-pinjaman yang disubsidi yang tidak sepenuhnya mengganti kerugian akibat meningkatnya harga minyak.

II. POLITIK LUAR NEGERI

Saddam Hussein menganut suatu politik luar negeri pragmatis yang memperjuangkan sasaran-sasaran nasional sesuai dengan urutan prioritas yang ditentukannya sendiri. Bagdad di bawah Saddam Hussein bukan lagi ibukota suatu negara yang terpencil. Bagdad mendapat kedudukan kunci di Dunia Arab dan menjadi salah satu fokus Dunia Ketiga. Dia adalah tujuan perjalanan para presiden, perdana menteri dan menteri dari semua benua dan blok. Berikut ini adalah ciri-ciri politik luar negeri Irak dalam periode yang kita tinjau.

Antar Arab

Konfrontasi Irak dengan Iran dilukiskan sebagai usaha untuk mencegah Revolusi Iran meluas ke Dunia Arab. Walaupun kebanyakan alasan bagi konfrontasi ini menyangkut hubungan antara kedua negara itu, Bagdad berhasil mendapat dukungan politik sekelompok negara konservatif, termasuk Arab Saudi, Jordania dan Emirata-Emirata Teluk. Pendapat umum ialah bahwa Irak tidak bermaksud meningkatkan konfrontasi dengan Iran itu, walaupun dia mengambil langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan eskalasi.

Usaha untuk mencapai hegemoni di kawasan Teluk dengan alasan-alasan militer, ekonomi dan politik menyusul jatuhnya rezim Shah Iran jelas

terungkap dalam gerak-gerak Irak sepanjang 1979. Irak berusaha membangun suatu kehadiran di semua forum Teluk dan apabila dilakukan usaha untuk mengabaikan ambisi ini - misalnya pada Konferensi Menteri Luar Negeri Teluk di Taif pada musim gugur tahun 1979, Irak mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar hal itu tidak terulang. Walaupun curiga, para penguasa negara-negara Teluk dan Arab Saudi mengakui kedudukan militer dan politik Irak yang lebih kuat. Ketakutan mereka akan Revolusi Khomeini tetap besar dan Irak berusaha memanfaatkannya untuk maksud-maksudnya sendiri. Irak menunjuk dirinya sebagai pejuang tuntutan dikembalikannya ketiga pulau di Teluk yang direbut oleh Iran pada tahun 1971 dari Uni Emirat Arab dan menawarkan untuk membantu Bahrain, Kuwait dan Emirat Teluk lain manapun yang terancam oleh Iran (perlu diperhatikan bahwa sebagian terbesar minyak Irak diangkut lewat Teluk). Politik Irak terhadap Iran, di samping pragmatisme Saddam Hussein seperti terungkap dalam mendinginnya hubungan dengan Moskwa, penindasan kaum komunis, partisipasi pada Konferensi Islamabad melawan invasi Soviet ke Afghanistan, pemutusan hubungan dengan Yaman Selatan, pembukaan pintu terhadap Eropa Barat, diperkuatnya aliansi dengan Pemerintah Jordania dan Arab Saudi, ikut membuat Irak diterima sebagai partner senior oleh negara-negara Teluk. Pendek kata, kepemimpinan Irak mungkin tidak diakui secara formal, tetapi Irak jelas adalah yang pertama di antara sesama negara.

Pengembangan hubungannya dengan negara-negara Arab konservatif bagi Irak merupakan semacam suatu pendalaman politik yang semakin jelas terungkap dalam munculnya koalisi segi tiga Irak-Jordania-Arab Saudi. Masing-masing dari ketiga negara itu mempunyai perbatasan bersama dengan kedua negara lainnya; mereka mempunyai kepentingan bersama sehubungan dengan Iran di satu pihak dan gerak-gerak Soviet dari Tanduk Afrika sampai Afghanistan di lain pihak; mereka kurang senang dengan politik Yaman Selatan terhadap blok Soviet; mereka juga kurang senang dengan Suriah, dan merupakan sokoguru Pertemuan Puncak Bagdad, sasaran-sasaran dan motif-motifnya. Fakta-fakta itu, di samping citra Irak yang lebih baik, merupakan latar belakang yang selaras bagi konsultasi dan koordinasi taktis antara mereka sebelum konferensi-konferensi antar Arab. Dewasa ini hubungan Bagdad—Amman tampak lebih kuat dan lebih penting daripada hubungan Bagdad—Riyadh atau hubungan Riyadh—Amman. Saddam Hussein berhasil menjalin hubungan cukup erat dengan Raja Hussein dan memberinya isi ekonomi dengan harapan hal itu dapat mendatangkan hasil-hasil penting dalam lingkungan antar Arab dan mungkin juga dalam lingkungan sengketa Arab—Israel. Pada tahap ini rupanya Irak mendapat lebih banyak manfaat dari segi tiga politik ini. Hubungan-hubungannya dalam segitiga ini merupakan contoh cemerlang keluwesan dan pragmatisme suatu negara yang pada prinsipnya dibimbing oleh Doktrin Baath - suatu doktrin yang meramu

komponen-komponen sosialisme, atheisme, sekularisme dan Pan Arabisme yang semuanya asing bagi kerajaan Jordania maupun Arab Saudi dan lebih cocok untuk Suriah dan Yaman Selatan.

Mengingat apa yang dikemukakan di atas, tidaklah mengherankan bahwa Irak relatif mudah berhasil menduduki tempat sentral di Dunia Arab setelah Mesir dipencilkan. Pertemuan Puncak Tunis (musim gugur 1979) dan Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri dan Ekonomi di Amman (Juli 1980) mengukuhkan keberhasilan Irak menarik garis politik dan ekonomi bagi kebanyakan Negara Arab. Hasil-hasilnya bahkan lebih menyolok kalau dibandingkan dengan hasil-hasil "front keteguhan" yang bertemu di Tripoli pada musim semi 1980, menyusul keretakan yang terjadi pada waktu Konferensi Para Menteri Luar Negeri Islam di Islamabad (Januari 1980) - keretakan yang untuk sebagian adalah akibat keputusan Irak untuk ikut serta dalam konferensi ini yang mempunyai watak anti Soviet ketika direncanakan.

Perasaan Bagdad memiliki kekuatan yang semakin besar membawa ke usul untuk menerima Piagam Nasional (8 Desember 1979), yang dalam kenyataan merupakan usaha pribadi Saddam Hussein untuk memaksakan suatu Doktrin Nonblok Arab dan memperlemah hubungan negara-negara Arab dengan blok-blok global. Bagaimanapun tahun 1979 menunjukkan bahwa adalah koalisi pimpinan Bagdad yang memberikan kepemimpinan politik di Dunia Arab, dan bukan "front keteguhan" pimpinan Suriah yang tidak dapat mengandalkan dukungan penuh Aljazair, PLO atau bahkan Yaman Selatan.

Hubungan-hubungan politik Irak dengan Suriah memburuk dan Irak rupanya ikut mendalangi pergolakan di Suriah. Di lain-lain bidang, hubungan Irak dengan Suriah lebih sedikit biasa. Minyak Irak masih mengalir ke dan lewat Suriah. Perbatasan kedua negara masih terbuka untuk lalu lintas orang dan barang. Lagi pula, baru-baru ini Irak menunjuk seorang Dubes baru untuk Damaskus menyusul kekosongan beberapa bulan, dan memenuhi komitmen-komitmen keuangannya menurut resolusi-resolusi Bagdad dan Tunis. Pendek kata, Irak rupanya berhasil memencilkan Suriah di Dunia Arab tanpa meningkatkan konfrontasi antara kedua negara, dan mungkin itulah maksud Irak sejak semula, yaitu menetralisasi Suriah dan mencegahnya merintangir Irak dalam usahanya untuk memimpin Dunia Arab.

Dalam konteks ini juga harus disebutkan pendekatan kembali antara Irak dan Maroko dan perbaikan hubungan Irak dengan Somalia, Sudan dan Oman, yang tetap ragu-ragu antara Mesir dan "front Bagdad".

Internasional

Semakin kuatnya kedudukan antar Arab-nya, potensi ekonominya dan kedudukannya dalam OPEC meningkatkan arti penting Irak di mata Barat, Timur dan Dunia Ketiga.

Hubungannya dengan Barat, terutama Eropa Barat, dilihat oleh Irak sebagai pengumpul (lever) ekonomi maupun politik. Sepanjang tahun 1979 Irak berhasil meningkatkan hubungannya dengan Italia, Jerman, Jepang, Spanyol, Skandinavia dan khususnya dengan Perancis. Lebih dari 75% impor Irak berasal dari Eropa Barat dan Jepang (perlengkapan militer, teknologi industri, knowhow nuklir dan seterusnya). Politik Irak terhadap Barat rupanya dibimbing oleh keinginannya untuk menciptakan suatu perimbangan politik dalam hubungannya dengan blok-blok dunia. Hubungannya dengan Barat bisa membantunya membebaskan dirinya dari ketergantungannya pada Uni Soviet khususnya dalam bidang suplai senjata dan memungkinkannya menganut politik nonblok yang dilihatnya sebagai suatu penyelesaian bagi masalah-masalah keamanan nasionalnya.

Sepanjang tahun 1979 hubungan Irak—Soviet, yang mulai memburuk pada pertengahan tahun 1978, tetap dingin, biarpun menjelang akhir tahun pertama Saddam Hussein sebagai presiden ada sedikit perbaikan.

Alasan-alasan nasional yang berkaitan dengan perkembangan antar Arab dan regional membuat Irak menjauhkan diri dari Uni Soviet. Berbagai unsur Barat - jurubicara-jurubicara kementerian luar negeri dan media massa di belakang mereka - membuat pernyataan-pernyataan jangkauan jauh mengenai usaha Irak untuk melepaskan diri dari Moskwa, tetapi pada hemat kami pernyataan-pernyataan itu berlebih-lebihan. Memang, gerak-gerak Soviet di Tanduk Afrika, Yaman Selatan dan Afghanistan membangkitkan ketakutan Irak bahwa gerak-gerak itu bisa membawa Uni Soviet dekat Teluk. Ketakutan ini terungkap dalam politik Irak menyusul invasi Soviet ke Afghanistan (kutukan umum invasi dan partisipasi Islamabad mengenai soal itu) dan dalam pembocoran-pembocoran ke pers Kuwait mengenai kemungkinan Irak membatalkan perjanjian persahabatan Irak—Soviet tahun 1972. Sikap mendua Uni Soviet dalam konfrontasi Irak—Iran dan dorongan yang diberikannya kepada kaum komunis Irak dan mungkin juga kepada orang-orang Kurdi juga tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki hubungan Irak—Soviet. Pada semuanya itu harus ditambahkan menurunnya hubungan perdagangan antara kedua negara.

Di lain pihak kita tidak boleh mengabaikan letak geografi Uni Soviet dekat bagian utara Irak dan Kurdistan, kekuatan lautnya di Samudera Hindia, dan

ketergantungan Irak pada suplai senjata Soviet termasuk perawatan, suku cadang dan sebagainya. Irak benar-benar sadar akan kenyataan-kenyataan itu dan selama beberapa bulan yang lalu dia tampak memperlambat keterasingannya dari Uni Soviet, dan kritik anti Soviet awal 1980 pelan-pelan menghilang. Selain itu, Bagdad tidak memboikot Olimpiade Moskwa, menerima Menteri Luar Negeri Afghanistan, bertukar delegasi ekonomi dengan Uni Soviet, mengadakan transaksi dengannya, menyatakan bersedia membaharui dialog dengan dia, terus mengembangkan hubungan erat dengan negara-negara blok Soviet dan memperbaiki hubungannya dengan Bulgaria. Juga ada trend untuk memperbaiki hubungan dengan Yaman Selatan.

Irak kelihatan ingin membatasi perselisihannya dengan Uni Soviet untuk menghindari resiko-resiko yang tak perlu, mendapatkan sebanyak mungkin dari Uni Soviet, dan pada waktu yang sama mempertahankan kebebasan bertindak.

Tahun pertama Saddam Hussein sebagai Presiden Irak adalah tahun kegiatan intensif dalam gerakan nonblok. Irak adalah aktif pada Pertemuan Puncak di Kuba (1979) dan berkat meningkatnya kedudukannya diberi privilesi untuk menjadi tuan rumah Pertemuan Puncak tahun 1982. Kegiatan Irak di antara negara-negara nonblok mempunyai dua tujuan: keamanan nasional, yaitu mencegah kawasan geostrategisnya diubah menjadi suatu kawasan konfrontasi superpower; dan tujuan politik, yaitu memperkuat kedudukannya di Asia, Afrika dan Amerika Latin lewat bantuan, pinjaman yang disubsidi dan berbagai hibah. Pinjaman-pinjaman yang disubsidi yang merupakan bagian transaksi-transaksi minyak menciptakan suatu afinitas politik ekonomi dengan banyak negara Dunia Ketiga, misalnya Kenya, Tanzania dan Bangladesh.

Sepanjang 1979 terjadi peningkatan besar dalam bantuan keuangan, militer dan teknis yang diberikan Irak kepada banyak Negara Afrika. Sebagian bantuan ini dikombinasikan dengan transaksi-transaksi senjata dengan Uni Soviet. Antara lain diketahui bulan Pebruari 1980 bahwa perlengkapan militer Soviet lama dikirimkan lewat udara dari Irak ke Zambia via Zaire. Sebagai imbalan perlengkapan lama ini, Irak menerima perlengkapan baru dari Uni Soviet. Di sementara negara yang terlibat terdapat pula instruktur-instruktur Irak. Sudah barang tentu bantuan ini merupakan bagian usaha Irak untuk mendapatkan kedudukan pimpinan di Dunia Nonblok.

Puluhan pejabat tinggi dari negara-negara nonblok di seluruh dunia, termasuk presiden, perdana menteri, menteri dan kepala staf, telah mengunjungi Irak untuk mendapatkan bagian kekayaannya. Sebaliknya pemimpin-pemimpin Irak jarang meninggalkan Irak dan hampir selalu hanya untuk

mengunjungi Arab Saudi. Satu-satunya kesempatan Saddam Hussein mengunjungi suatu ibukota di luar Dunia Arab sebagai presiden adalah ketika dia menghadiri upacara pemakaman pendiri terakhir gerakan nonblok - Marsekal Tito dari Yugoslavia. Tidak tanpa alasan Saddam Hussein disebut Tito Arab. Walaupun Irak dekat dengan Blok Timur bukan saja secara geografis tetapi juga ideologis, pertimbangan-pertimbangan politik keamanan mendorong Irak untuk menganut suatu netralisme seperti Tito, yang seperti Abdul Nasser dikagumi oleh Saddam Hussein dan dalam segi-segi tertentu ditirunya.

Sengketa Arab—Israel

Sengketa Arab—Israel tidak menempati prioritas tinggi dalam tahun pertama Saddam Hussein sebagai presiden. Pada tahap ini Israel tidak merupakan suatu medan tempur bagi Irak. Paling banyak Israel adalah sebuah alat untuk memperkuat kepemimpinan Irak di Dunia Arab. Dalam konsep Irak seperti diutarakan oleh seorang jurubicara Israel yang berwibawa, tiada ruang untuk membicarakan suatu alternatif politik bagi persetujuan Camp David selama Israel memiliki keunggulan militer terhadap negara-negara Arab berkat bantuan Amerika Serikat. Maksud Irak ialah secara simultan bergerak ke dua arah: pertama, membangun kekuatan militer dan teknologi, termasuk kekuatan nuklir; dan kedua, melancarkan suatu ofensif politik untuk merongrong ikatan-ikatan Israel dengan Eropa dan mendorong komitmen Amerika terhadap Israel lewat suatu Eropa yang tunduk pada tekanan-tekanan Arab.

Sesuai dengan itu Irak menyambut baik pernyataan kesembilan negara di Venesia sebagai suatu langkah ke arah yang tepat walaupun tidak cukup. Irak mengakui bahwa dewasa ini negara-negara Arab tidak mampu mengalahkan Israel dan oleh sebab itu mengakui kenyataan-kenyataan dan menyetujui dibentuknya suatu Negara Palestina di "bagian Palestina manapun yang dibebaskan dari pendudukan Israel", sambil melakukan persiapan-persiapan untuk tahap di mana negara-negara Arab akan memiliki keunggulan militer terhadap Israel. Perlu dicatat bahwa sikap ini, yang untuk pertama kalinya dinyatakan bulan Juni 1980, merupakan suatu pergeseran dalam politik Irak yang menentang didirikannya suatu Negara Palestina di samping Israel, bahkan dengan alasan-alasan taktisipun.

Selaras dengan garis itu, Irak secara konsisten tidak mau terlibat dalam segala gerak yang bisa membawanya berhadapan dengan Israel sebelum siap. Ketika ketegangan antara Suriah dan Israel meningkat bulan Januari 1980, menyusul perpindahan pasukan-pasukan di Libanon, Irak tidak menyatakan

mendukung Suriah, jangankan bersedia membantu Suriah apabila terjadi konfrontasi dengan Israel.

Kendati segala usaha negara-negara Barat untuk menemukan suatu tanda perlunakan sikap Irak terhadap Israel, Irak tetap menolak eksistensi Israel yang disebutkan sebagai "entitas Zionis" oleh Saddam Hussein dalam pidatonya tanggal 8 Pebruari 1980 ketika dia mengajukan usul Piagam Nasional. Irak juga menolak resolusi Dewan Keamanan 242, mendukung aksi-aksi teroris melawan Israel dan bahkan terlibat (misalnya dalam serangan terhadap Misgav Am bulan April 1980), dan mengenakan tekanan-tekanan ekonomi atas negara-negara Barat dan Dunia Ketiga agar menerima asas-asas pandangan Arab dan merugikan Israel, misalnya sehubungan dengan soal pemulihan hubungan diplomasi antara negara-negara Afrika dan Israel. Irak adalah ujung tombak perang politik pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional.

III. PENUTUP

Sebagai penutup disajikan ringkasan dan evaluasi keadaan dalam negeri dan politik luar negeri Irak dalam tahun pertama Saddam Hussein sebagai presiden.

Keadaan Dalam Negeri

Bahaya paling besar yang bisa mengancam rezim Saddam Hussein datang dari koalisi semua kekuatan oposisi, tetapi kemungkinan ini tidak besar.

Mengenai unsur-unsur oposisi di luar pemerintahan/kelompok yang berkuasa, pemerintah sangat takut bahwa pergolakan di kalangan umat Shia akan meningkat dengan dukungan Iran. Bila pecah perang antara Irak dan Iran, masalah ini bisa meningkat menjadi suatu front dalam negeri melawan rezim.

Suatu pemberontakan Kurdi pada tahap ini rupanya tidak besar kemungkinannya. Rezim Baath dapat dianggap mampu untuk menghadapi krisis Kurdi dan membendung bahayanya. Selama Revolusi Iran bersengketa dengan golongan Kurdi Iran, kiranya mudah bagi rezim Bagdad untuk menumpas suatu pemberontakan Kurdi di bagian utara negara.

Dalam jangka menengah tidak diperkirakan akan terjadi pergolakan dalam pimpinan sekarang ini. Gaya memerintah Saddam Hussein dan cara-

cara Stalinisnya - dari kultus pribadi dan banyaknya hukuman mati termasuk hukuman mati pejabat-pejabat senior angkatan darat, partai dan pemerintah sipil - menaburkan benih-benih komplotan melawan dia. Akumulasi kekuasaan di tangan Wakil PM I Taha Hussein Ramadhan dan permusuhan tersembunyi antara dia dan Saddam Hussein bisa menjurus ke suatu perebutan kekuasaan. Ada alasan-alasan untuk menyimpulkan bahwa akan terjadi perubahan dalam pimpinan Irak dalam dua tahun mendatang ini.

Kemampuan Saddam Hussein untuk bertahan dalam kekuasaan sebagian besar bergantung pada tingkat kontrol yang bisa dipertahankannya atas angkatan darat. Setiap usaha untuk menantang pemerintahan Saddam Hussein harus datang dari tubuh angkatan darat atau dilakukan dalam kerja sama dengan unsur-unsur pentingnya.

Untuk memperkuat kedudukannya, Saddam Hussein akan meningkatkan kampanye popularitasnya di seluruh negeri dan akan berusaha membuktikan bahwa dia memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kekayaan sumber daya Irak yang berlimpah akan membantunya dalam usaha itu.

Dalam kebijaksanaan dalam negeri, Saddam Hussein harus meneruskan garis pragmatismenya dan melepaskan berbagai asas Baath, dan secara demikian mengambil resiko munculnya suatu oposisi ideologi dalam partai itu sendiri.

Kebijaksanaan pembangunan militer dan ekonomi akan diteruskan dengan maksud untuk memperkuat rezim dan memungkinkannya mewujudkan ambisi-ambisi Irak di Dunia Arab dan Dunia Ketiga. Irak akan terus mengurangi ketergantungannya pada suplai senjata Soviet, mempercepat transformasinya menjadi suatu kekuatan laut dan mungkin meningkatkan kerja sama militernya dengan Jordania.

Politik Luar Negeri

Rezim Baath Irak diperkirakan akan terus mempertahankan sasaran-sasaran strategi yang diperjuangkannya sejak berkuasa pada tahun 1968, yaitu unifikasi bangsa Arab di bawah pimpinan Irak. Caranya ialah secara bertahap berusaha mencapai hegemoni di kawasan Teluk dan berusaha memanfaatkan kedudukan ini di lingkungan Arab. Bagdad berkepentingan untuk menyelesaikan gerak-geraknya secara cepat selama Mesir terkucil di Dunia Arab. Irak jelas berkepentingan dengan isolasi Mesir, dan Saddam Hussein akan berusaha mempertahankan dan bahkan memperluas hasil-hasil yang dicapainya pada Pertemuan Puncak Bagdad.

Kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahwa Saddam Hussein akan lebih senang membantu mempercepat tersingkirnya Presiden Assad dengan maksud untuk memulihkan poros Irak—Suriah sebagai satu-satunya kekuatan efektif melawan Mesir, tetapi sementara itu usaha untuk mengucilkan Suriah akan berlangsung terus.

Konfrontasi dengan Iran kiranya akan berlangsung terus selama Khomeini berkuasa di Iran. Irak diduga akan mempertahankan format/tingkat konfrontasi sekarang ini sambil mencari kesempatan yang baik untuk memberikan suatu pukulan yang menentukan kepada Iran.

Di lingkungan internasional, Irak akan berusaha mencapai suatu perimbangan dalam hubungan-hubungannya dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat agar mampu mempertahankan jarak dengan Uni Soviet dan pada waktu yang sama mengambil keuntungan dari hubungan militer dengan Uni Soviet, paling tidak selama dia masih bergantung secara militer padanya. Dengan maksud itu dia akan memperluas dan meningkatkan ikatan-ikatannya dengan Eropa Barat dan berusaha untuk tidak menjadi terlalu dekat dengan Amerika Serikat. Politik ini juga sesuai dengan usaha Irak untuk menjadi pemimpin nonblok.

Mengenai Israel, Irak tetap menolak eksistensinya. Pemimpin-pemimpin Irak bisa menunjukkan sedikit keluwesan taktis dan semantis untuk menimbulkan kesan yang lebih moderat bagi Barat. Akan tetapi Israel tidak mempunyai pilihan selain menafsirkan pernyataan-pernyataan mereka mengenai keharusan historis untuk mematahkan keunggulan militer dan teknologi Israel sebagai suatu pembukaan bagi suatu perang total.

Pendek kata, kendati politik pragmatis Irak, menurut penilaian kita ada unsur-unsur di Dunia Arab yang berusaha untuk mencegahnya mewujudkan ambisi-ambisinya itu. Dapat diduga bahwa Bagdad akan mengalami kekecewaan dan kemunduran akibat ketakutan dan kecurigaan negara-negara Arab lain, termasuk negara-negara yang bersedia membentuk suatu koalisi pragmatis dengan Irak. Ini berlaku untuk Jordania dan Arab Saudi dan pasti juga untuk Suriah, saingannya di kawasan Bulan Sabit (Fertile Crescent). Ketiga negara ini, yang semuanya berbatasan dengan Irak, akibat watak, kepentingan-kepentingan dan struktur mereka tidak mampu membantu mewujudkan visi Irak, yang bagaimanapun hanya akan menjadikan mereka negara-negara vasal Irak dan mungkin bahkan korban pengambilalihan oleh Irak yang dibarengi kekerasan yang merupakan ciri temperamen Irak dan mengejawantah dalam diri Saddam Hussein Al-Takriti.